

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penanggulangan Kemiskinan

Abu Huraerah^{1*}, Nina Kurniasih², Sinta Yulianti Suyono³

¹Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Pasundan

²Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Pasundan

³Program Studi Rehabilitasi Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial

*Corresponding author: huraerah_ks@unpas.ac.id

ARTICLE INFO

Submitted:

March 3, 2026

Review:

March 31, 2026

Accepted:

April 21, 2026

Available online:

April 30, 2026

Article Citation (APA):

Huraerah, A., Kurniasih,

N., & Suyono, S. (2026).

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat dalam

Penanggulangan

Kemiskinan. *Jurnal*

Publisitas, 12(2), 148-163.

[https://doi.org/10.37858/j](https://doi.org/10.37858/jurnalpublisitas.v12i2.687)

[urnalpublisitas.v12i2.687](https://doi.org/10.37858/jurnalpublisitas.v12i2.687)

DOI: [https://doi.org/10.3](https://doi.org/10.37858/jurnalpublisitas.v12i2.687)

[7858/publisitas.v12i2.687](https://doi.org/10.37858/jurnalpublisitas.v12i2.687)

ABSTRAK

Kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan kemanusiaan yang menuntut kehadiran negara dan pemerintah daerah secara nyata dan berkeadilan. Kemiskinan tercermin dalam keterbatasan pendapatan, kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup layak, dan terpinggirkannya kelompok masyarakat dari roda pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan strategi Kabupaten Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, diskusi kelompok terarah, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Penyusunan RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Tahun 2025-2030, dan kebijakan spesifik dalam program "*Bandung Barat Ca'ang*". Sementara, strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, optimalisasi otonomi daerah melalui SDGs Desa, dan analisis data berbasis wilayah. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, baik dimensi ekonomi, budaya, maupun struktural dan multisektor. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang ditopang oleh data yang akurat dan valid, arah kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Selanjutnya, agar dilakukan penelitian yang spesifik tentang kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis budaya lokal di Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is not simply an economic issue, but a humanitarian one that demands the real and just presence of the state and local governments. Poverty is reflected in limited income, disparities in access to basic services, the inability to meet the necessities of a decent life, and the marginalization of community groups from the wheels of development. Purpose of the study to analyze the policies and strategies of the West Bandung Regency Government in poverty alleviation. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques used are unstructured interviews, focus group discussions, observations, and document studies. The results of the study indicate that there are several policies of the West Bandung Regency Government in poverty alleviation, namely the Regulation of the Regent of West Bandung Regency concerning the RAD (Rencana Aksi Daerah-Regional Action Plan) for Poverty Alleviation, the Regional Regulation of West Bandung Regency concerning the Implementation of Legal Aid for the Poor, the Preparation of the RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah-Regional Poverty Alleviation Plan) for 2025-2030, and specific policies in the "*West Bandung Ca'ang*" program. Poverty alleviation

strategies include economic empowerment, social protection, optimizing regional autonomy through Village SDGs, and area-based data analysis. Poverty is a multidimensional problem, encompassing economic, cultural, structural, and multisectoral dimensions. Therefore, poverty alleviation measures supported by supported by accurate and valid data, targeted policy direction, and strategies are needed. Then, specific research on local culture-based poverty alleviation policies and strategies in West Bandung Regency is needed.

Keywords: *Poverty Alleviation Policy, Poverty Alleviation Strategy, Poverty*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai bagian dari kawasan strategis nasional memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) KBB menunjukkan bahwa pada September 2024, angka kemiskinan masih berada di angka 10,49% dari total penduduk sekitar 1,88 juta jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 70,77 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,75% memperlihatkan adanya tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp30,62 juta belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Badan Pusat Statistik, 2025).

Kemiskinan di KBB masih menjadi isu serius, dengan persentase penduduk miskin tertinggi di kawasan Bandung Raya pada Maret 2025 sekitar 9,87% atau 169,66 ribu jiwa, meskipun trennya menurun dalam 10 tahun terakhir (dari 12,67% menjadi 10,49% pada 2024), tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata di Jawa Barat, disebabkan faktor seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya lapangan kerja, dan akses terbatas ke pelayanan dasar, serta menghadapi tantangan unik seperti bencana alam dan inflasi (Badan Pusat Statistik, 2025).

Meskipun ada *progress*, kemiskinan di KBB tetap menjadi isu prioritas. Upaya penanggulangan memerlukan solusi komprehensif yang menyentuh akar masalah seperti peningkatan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan aksesibilitas layanan, serta mitigasi dampak bencana alam yang sering melanda wilayah ini. KBB masih menghadapi tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan, menjadikannya pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Kemiskinan adalah potret kehidupan nyata dari mereka yang belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan tindakan yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin dan rentan. Berbagai kajian, seperti yang dilakukan Hasibuan (Aulia, H. & Saputra, 2021), menunjukkan bahwa intervensi yang tepat sasaran seperti pemanfaatan dana desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat telah memberi kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, efektivitas program masih menghadapi tantangan, mulai dari ketepatan sasaran hingga konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan kajian komprehensif dalam Laporan Kajian Kemiskinan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat, sebagian besar masyarakat di kecamatan-kecamatan seperti Gunung Halu, Rongga, dan Cipongkor menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi informal. Wilayah-wilayah ini menghadapi keterbatasan akses alat pertanian modern, infrastruktur jalan, dan pasar. Beberapa komunitas juga menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan menengah, serta air bersih, dan sanitasi. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan pendidikan masyarakat, minimnya keterampilan kerja produktif, serta ketergantungan pada hasil alam yang tidak menentu. Meski

demikian, masyarakat di banyak kecamatan menunjukkan potensi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pariwisata berbasis budaya, dan keterampilan lokal. Masyarakat juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelatihan, bantuan modal usaha, pelestarian budaya, serta digitalisasi layanan dan promosi usaha.

Kemudian, pada 2024, tercatat sebanyak 761.412 individu atau 10,49% penduduk KBB hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp426.355/kapita/bulan. Rumah tangga miskin paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Cicalongwetan, Cipongkor, dan Gunung Halu. Sebagian besar kepala keluarga miskin memiliki pendidikan rendah (mayoritas hanya tamat SD atau SMP) dan bekerja di sektor informal seperti buruh tani, pekerja lepas, atau belum bekerja. Kondisi rumah keluarga miskin juga menunjukkan tantangan seperti bangunan tidak layak huni, atap dan dinding dari bahan tidak permanen, serta akses sanitasi yang buruk. Sektor pendidikan menunjukkan adanya anak tidak sekolah cukup signifikan (17.684 anak), dengan penyumbang terbesar dari Cipatat, Lembang, dan Cicalongwetan (Pemda KBB, 2024). Selain itu, kondisi rumah tangga miskin memperlihatkan kerentanan tambahan terhadap *stunting* dan ketimpangan layanan dasar. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan di KBB tidak hanya terkait dengan konsumsi (pengeluaran), tetapi juga aspek non-konsumsi seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di KBB sangat beragam antar kelompok ekonomi. Rata-rata pengeluaran kelompok 40% terbawah tercatat hanya sebesar Rp 528.318, berada sangat dekat atau bahkan di bawah garis kemiskinan nasional yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp 595.242/kapita/bulan. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga dalam kelompok ini secara fungsional dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin konsumsi (Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun, 2023)

Strategi pemerintah KBB dalam penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada ekonomi dan tidak menyentuh aspek sosial-budaya dan sedikit sekali berkaitan dengan aspek struktural atau politik. Dalam kaitan ini, Ellis (Moeljarto, 1994), mengungkapkan masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berhubungan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya bersentuhan dengan kesejahteraan materi (*material well-being*), tetapi juga berkenaan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*).

Untuk menunjang keberhasilan strategi penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal; memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut; melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin; meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait; menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagimunculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat (Aulia, H. & Saputra, 2021).

Sebagai perbandingan, berikut ini dijelaskan beberapa hasil penelitian di beberapa wilayah kabupaten di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa proses dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon. Masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon menerima berbagai bantuan, namun implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sering gagal karena dana tidak memadai, lemahnya pengawasan

dan data yang tidak valid. Mereka menginginkan transparansi penerima bantuan serta pelatihan dan modal usaha. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi dan peran struktur birokrasi dalam mewujudkan transparansi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Hardiyansyah & Amin, 2025)

Penanganan masalah kemiskinan harus terintegrasi dan sinergi antar berbagai sektor. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tuban dilakukan melalui sinergitas program dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Sinergitas ini diperoleh melalui analisis akar masalah dan review kebijakan dari kemiskinan dalam hal ekonomi dan sosial. Atas dasar akar masalah dan review kebijakan, strategi pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tuban dilakukan melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan penjaminan sosial. Sinergitas antar OPD dalam pengurangan kemiskinan dilakukan melalui integrasi program kegiatan dan kerjasama antar OPD yang dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (Santoso, E., B., Sutikno, Siswanto, V., K., dan Setyaningsih, 2023).

Pengentasan kemiskinan memerlukan program yang tepat sasaran dan memperhatikan karakteristik ekonomi masyarakat yang menjadi target. Program-program penanggulangan kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu program yang khusus untuk kaum miskin dan program yang berlaku untuk semua golongan masyarakat. Pentingnya ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, pemerintah yang baik serta pembangunan sosial juga menjadi faktor penunjang dalam pengentasan kemiskinan (Ariansyah et al., 2024). Selain itu, penggunaan teori pemberdayaan dan dimensi-dimensi pembangunan sosial lebih tepat digunakan karena dapat mencakup keseluruhan terkait dengan konsep kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam mengatasi permasalahan tersebut (Baykin dan Widinarsih, 2022).

Persamaan penanggulangan kemiskinan di atas adalah mencakup mencakup pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial (seperti PKH dan BLT), peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada aspek kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.

Berbagai studi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten umumnya menekankan efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, namun belum banyak yang memetakan secara rinci kombinasi kebijakan (policy mix) daerah terbaru—terutama integrasi dokumen perencanaan (RAD/RPKD), regulasi sektoral (misalnya bantuan hukum), serta program spesifik daerah—dan bagaimana kombinasi tersebut dijalankan melalui koordinasi lintas OPD berbasis data. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat melalui bukti wawancara, FGD lintas OPD, observasi, dan dokumen kebijakan. Kontribusi penelitian adalah penyajian pemetaan kebijakan—strategi—aktor pelaksana dan rekomendasi penguatan tata kelola data serta koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan ketepatan sasaran intervensi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah (Martono, 2016). Dunia sosial dalam penelitian ini tidak diciptakan atau “diatur” oleh peneliti, akan tetapi diformulasikan dan diciptakan oleh individu sebagai objek penelitian

(Berg, n.d.; Corbetta, 2003; Payne, G. and Payne, 2011; Sarosa, 2021). Peneliti kualitatif seringkali meneliti hubungan antara teori dan praktik sosial dengan berusaha menemukan pola-pola umum yang berlaku di masyarakat (Johann Mouton, 1988; Snape & Spencer, 2003)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat data penelitian mampu menjaga integritas objek, artinya berbagai data yang berkaitan dengan penelitian dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Peneliti melakukan riset yang cermat terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu dengan kasus-kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell bahwa "studi kasus adalah strategi penelitian di mana peneliti dengan cermat menyembunyikan suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu" (Creswell, 2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis kebijakan dan strategi pemerintah KBB dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, serta keputusan-keputusan Pemerintah KBB. Disamping itu, menganalisis kehidupan sosial, kebiasaan, emosi, dan perasaan yang dialami oleh individu, serta struktur sosial, peran sosial, dan tingkah laku individu.

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Bryman (2008), *purposive sampling* adalah bentuk sampling non-probabilitas. Bryman mengatakan bahwa sebagian besar sampling dalam penelitian kualitatif melibatkan *purposive sampling* dalam beberapa bentuk (Bryman, 2008). Sampel purposif merupakan sampel yang berfokus pada informan terpilih untuk studi mendalam. Informan terpilih merupakan informan yang memiliki informasi dan kemampuan untuk memberikan informasi dan data yang jelas dan komprehensif tentang substansi penelitian.

Dalam hal ini, informan penelitian yaitu perwakilan dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappelitbangda KBB, instansi/dinas terkait, dan beberapa kecamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur menurut Gillham, 2000; Spradley, 1979 (Sarosa, 2021) tidak ada pedoman apapun. Sarosa mengatakan bahwa pewawancara tidak memerlukan daftar pertanyaan yang menuntun arah wawancara (Sarosa, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan ibu Widia Eka Aprilianti (WEA) sebagai Analis Pemerintahan Daerah dan Sunu Nugraha (SN) sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappelitbangda KBB.

2. Diskusi Kelompok Terarah (*focus group discussion/FGD*).

FGD merupakan strategi pengumpulan data yang melibatkan wawancara dan diskusi secara intensif dengan kelompok kecil mengenai masalah tertentu (Martono, 2016). Peserta FGD dalam penelitian ini melibatkan Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Bandung Barat dan perwakilan dari instansi/dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan yang pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi menurut Patton adalah deskripsi lapangan tentang aktivitas, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi antarmanusia, proses organisasi atau komunitas, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati (Patton, 2002). Data terdiri dari catatan lapangan merupakan

deskripsi yang kaya dan rinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan. Dalam kaitan ini, peneliti mengamati dan mencatat segala aktivitas, perilaku, percakapan, interaksi sosial, dan pengalaman informan.

4. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2016). Dokumen yang diperoleh adalah dokumen laporan kajian/penelitian dan peraturan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1994) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, M.B. & Huberman, 1994). Sementara itu, analisis data terperinci menggunakan pengkodean manual. Pengkodean manual terdiri dari pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean aksial (*axial coding*), dan pengkodean selektif (*selective coding*) (Saldana, 2009; Strauss, A. L. and Corbin, 1998)). Ketiga proses koding tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Open coding*: proses awal dalam bidang koding yang melibatkan peneliti dalam mengidentifikasi kategori, properti, dan dimensi dari jawaban yang diberikan oleh sumber data atau informan. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi topik melalui pelabelan, pengelompokan, serta pencatatan.
2. *Axial coding*: pada tahap ini, peneliti mencoba mengorganisasikan data dengan menghubungkan kategori-kategori yang telah diidentifikasi dalam proses *open coding*. Peneliti membangun relasi antar kategori yang berdasarkan konteks, pola interaksi, konsekuensi, atau faktor penyebab. Pengembangan relasi tersebut tidak hanya terbatas pada satu kategori, tetapi mencakup relasi antar sub-kategori dan berkaitan antara kategori dengan sub-kategori di bawahnya.
3. *Selective coding*: tahapan di mana peneliti melakukan seleksi kategori yang paling mendasar dan memiliki keterkaitan dengan kategori lainnya secara sistematis. Selain itu, seorang peneliti juga melakukan validasi terhadap hubungan tersebut. Tujuan dari proses seleksi ini yaitu untuk menghasilkan penjelasan ilmiah mengenai fenomena yang akan diteliti dengan menjelaskan hubungan antara kategori kode yang telah ditemukan dalam tahap sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Tulis secara sistematis, berurutan seperti pada langkah kerja di metode dan berujung pada temuan penting. Untuk data yang banyak dan rumit, lengkapi dengan ilustrasi. Pembahasan difokuskan pada mengaitkan data dan hasil analisisnya dengan permasalahan atau tujuan penelitian dan konteks teoretis yang lebih luas. Dapat juga pembahasan merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data.

1. Kebijakan Pemerintah KBB dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai bagian dari Jawa Barat, KBB dihadapkan pada tantangan struktural dan geografis yang memerlukan pendekatan komprehensif. Kebijakan ini hadir untuk memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penanggulangan kemiskinan di KBB

bukanlah sekadar angka statistika, melainkan upaya kemanusiaan yang membutuhkan langkah terpadu. Kebijakan ini hadir sebagai panduan aksi kolaboratif, mempertemukan program pemerintah, partisipasi dunia usaha, dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya Bandung Barat yang **AMANAH** (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).

Hal ini selaras dengan pendapat Informan SN mengenai kebijakan daerah KBB dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

“... penanggulangan kemiskinan sebagai kewajiban konstitusional dan prioritas pembangunan yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi. Pemda KBB menilai bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan spesifik yang disesuaikan dengan kondisi lokal (spesifik lokasi) untuk memastikan efektivitas bantuan dan program” (Informan SN, Juli 2025).

Pemerintah Daerah KBB menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan memang memerlukan strategi spesifik lokasi (spasial) agar program lebih efektif. Meskipun angka kemiskinan di KBB tercatat menurun menjadi 9,87 persen pada Maret 2025 (dari 10,49 persen pada 2024), angkanya masih berada di atas rata-rata Jawa Barat.

Sementara, hasil kegiatan FGD adalah sebagai berikut:

“... penanggulangan kemiskinan sebagai upaya prioritas yang harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis data. Fokus utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor” (Hasil FGD, Juli 2025).

Penurunan angka kemiskinan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif yang bertumpu pada kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penurunan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh satu instansi. Kolaborasi lintas sektor, yang didukung oleh data terintegrasi dan komitmen bersama, mampu meningkatkan efektivitas program, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berfokus pada RAD (Rencana Aksi Daerah) 2019-2023 yang mencakup intervensi sasaran individu/wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan integrasi data lintas sektor. Program utamanya meliputi penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan jaminan sosial, serta pemberdayaan usaha masyarakat melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk mengurangi kemiskinan secara sistematis.

Beberapa kebijakan Pemerintah KBB dalam penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati KBB tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Bupati Bandung Barat (Perbup KBB) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan 2019-2023 berfokus pada pendekatan terpadu, sistematis, dan multisektor untuk menurunkan angka kemiskinan melalui komitmen sinergi antar pihak, pemetaan profil kemiskinan, serta pelaksanaan program pemberdayaan dan bantuan berbasis lokasi prioritas.

Berikut adalah poin-poin penting implementasi Perbup tersebut:

- 1) **Tujuan dan Dasar Hukum:** Perbup ini menjadi pedoman operasional dalam menyusun arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di KBB.

- 2) **Strategi dan Komponen RAD:** Implementasi mencakup analisis kondisi umum, profil kemiskinan, kebijakan intervensi (individu/wilayah), serta rekapitulasi kegiatan 2019-2023.
- 3) **Sinergi Kelembagaan:** Mengedepankan koordinasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
- 4) **Program Pemberdayaan:** Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui program pemberdayaan, contohnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
- 5) **Monitoring dan Evaluasi:** Perbup ini mengamanatkan pemantauan berkala terhadap program-program yang dilaksanakan untuk memastikan target penurunan kemiskinan tercapai.

Implementasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh dengan fokus pada lokasi prioritas yang telah ditentukan dalam dokumen rencana aksi. KBB menyusun model intervensi terstruktur untuk kurun waktu 2019-2023 dan hingga kini Perbup KBB tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) Penanggulangan Kemiskinan tersebut belum diperbarui.

b. Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 mencakup hak dan kewajiban, tata cara permohonan, penyaluran dana, pelaporan, evaluasi, hingga pengawasan bantuan hukum. Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan penyelenggaraan bantuan hukum tidak berbayar bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Perda ini mengatur syarat permohonan, mekanisme penyaluran dana, serta pelaporan dan pengawasan untuk menjamin akses keadilan yang merata.

Berikut adalah poin-poin penting dalam Perda No. 5 Tahun 2025:

- 1) **Tujuan:** Memberikan bantuan hukum bagi warga miskin yang tersangkut masalah hukum agar mendapatkan hak-hak hukumnya.
- 2) **Ruang Lingkup:** Mencakup masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- 3) **Pemberi Bantuan:** Melibatkan lembaga bantuan hukum (LBH) yang memenuhi syarat.
- 4) **Larangan:** Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum.
- 5) **Pembiayaan:** Anggaran berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung Barat.
- 6) **Pelaporan:** Laporan realisasi anggaran disampaikan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Bupati melalui bagian hukum.
- 7) **Sosialisasi:** Pemerintah KBB telah melakukan sosialisasi produk hukum ini pada November 2025.

Peraturan Daerah ini bertujuan meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bandung Barat

c. Penyusunan RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Tahun 2025-2030

KBB menetapkan kebijakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (RAD) 2019-2023, yang mencakup intervensi berdasarkan sasaran individu dan wilayah (kelurahan/kecamatan) secara terkoordinasi. Dalam Penyusunan RPKD 2025-2030, Bappelitbangda KBB bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan memperbarui rencana dengan kolaborasi lintas sektor untuk penanganan yang lebih mutakhir. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2025-2030 difokuskan pada strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proses ini melibatkan forum konsultasi publik untuk menyelaraskan program pembangunan daerah, bertujuan menurunkan angka kemiskinan secara terukur.

- 1) **Tujuan utama:** Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan identifikasi masalah kemiskinan secara sistematis.
- 2) **Proses dan Tahapan:** Penyusunan dilakukan melalui rapat koordinasi, FGD, dan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan Bappelitbangda dan pemangku kepentingan terkait.
- 3) **Keterkaitan Kebijakan:** RPKD 2025-2030 menjadi panduan operasional yang sejalan dengan RPJMD 2025-2030 untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) **Fokus Program:** Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan transformasi pemberdayaan ekonomi.
- 5) **Prioritas Program:** Proses ini ditargetkan menghasilkan peta jalan yang konkrit, di mana RPKD berfungsi sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

d. Kebijakan Spesifik

Kebijakan spesifik diwujudkan dalam inisiatif lokal seperti program "*Bandung Barat Ca'ang*" (*ca'ang* artinya terang). "*Bandung Barat Ca'ang*" adalah program Pemerintah KBB untuk meningkatkan PJU (penerangan jalan umum) dan jalan lingkungan, dengan target pemasangan hingga 12.000 titik cahaya untuk meningkatkan keamanan dan ekonomi. Program ini menargetkan wilayah pedesaan dan daerah terpencil di 15 kecamatan, seperti Cikalongwetan hingga Gununghalu. Program "*Bandung Barat Ca'ang*" ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, seringkali dikaitkan dengan inisiatif "*Jabar Ca'ang*", untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Jawa Barat. Poin-poin penting terkait program "*Bandung Barat Ca'ang*" adalah sebagai berikut:

- 1) **Tujuan:** Menerangi jalan utama, jalan lingkungan, dan gang sempit untuk meningkatkan keamanan dan mendukung aktivitas warga.
- 2) **Target:** Pemasangan 12.000 titik cahaya.
- 3) **Inovasi:** Program ini mencakup pemasangan baru dan pemeliharaan PJU yang sudah ada.
- 4) **Tantangan:** Lokasi geografis yang pelosok dan terpencil menyulitkan petugas dalam mendirikan tiang dan membangun infrastruktur jaringan listrik.
- 5) **Isu Terkait:** Terdapat laporan dugaan penyimpangan pelaksanaan di lapangan, seperti PJU yang tidak berfungsi dan masalah pada pemeliharaan.

- 6) **Kolaborasi:** Program ini melibatkan kolaborasi antara Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Bandung Barat dan pihak terkait untuk penyediaan energi dan instalasi listrik.

KBB belum pernah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga miskin. UU ini bertujuan meningkatkan taraf hidup, menjamin hak dasar, dan memelihara fakir miskin serta anak terlantar sesuai amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di KBB berfokus pada penguatan otonomi daerah, pemberdayaan ekonomi produktif, dan perbaikan data terpadu untuk efektivitas intervensi. Strategi ini melibatkan pendekatan berbasis wilayah dan sektoral untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, tetapi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan disparitas wilayah. Secara umum, efektivitas penanggulangan kemiskinan di KBB memerlukan penguatan dalam akurasi data, sinergi kebijakan, serta keberlanjutan program pemberdayaan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan tunai semata.

Realitasnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan di KBB terlalu terfokus pada bantuan sosial yang memanjakan warga dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi. Program-program bantuan sosial yang ada cenderung membuat masyarakat menjadi ketergantungan, bukannya mandiri secara ekonomi. Untuk itu, KBB harus lebih intensif melaksanakan program-program pemberdayaan sosial. Program pemberdayaan sosial bukan hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga aspek yang lain seperti aspek sosial-budaya, psikologis, dan struktural. Metode yang diterapkan dinilai kurang tepat sasaran, menyebabkan angka kemiskinan tetap tinggi akibat ketergantungan pada bantuan sosial, kurangnya inovasi, dan lemahnya identifikasi potensi SDM.

2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta kerentanan terhadap guncangan sosial-ekonomi. Sebagai wilayah yang dinamis, KBB memiliki tantangan unik yang memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu strategi KBB dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu berfokus pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagaimana dikemukakan Informan WEA yaitu sebagai berikut:

“KBB berkomitmen untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan secara signifikan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan mewujudkan Bandung Barat yang lebih adil, makmur, dan berdaya saing” (Informan WEA, Juli 2025).

KBB dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) umumnya difokuskan pada tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM di wilayah regional seperti KBB menuntut komitmen pemerintah dalam optimalisasi akses pelayanan kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, dan peningkatan ekonomi.

Hasil FGD tentang strategi penanggulangan kemiskinan di KBB adalah sebagai berikut:

“Pemerintah KBB berkomitmen penuh melakukan akselerasi penurunan angka kemiskinan. Melalui strategi yang terintegrasi dan fokus pada peningkatan kualitas

sumber daya manusia serta optimalisasi potensi ekonomi lokal. Strategi ini dirancang untuk menyasar akar permasalahan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan” (Hasil FGD, Juli 2025).

Strategi terintegrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi potensi ekonomi lokal menunjukkan pendekatan proaktif yang menghubungkan pengembangan kompetensi individu dengan produktivitas ekonomi wilayah. Strategi ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mengurangi kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya setempat, baik alam maupun sosial-budaya.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah KBB dalam penanggulangan kemiskinan:

a. Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah KBB menekankan model pemberdayaan perekonomian masyarakat. Fokusnya adalah memberikan sarana, keterampilan, dan modal usaha agar masyarakat miskin mampu mandiri dan menghasilkan pendapatan sendiri, daripada hanya bergantung pada bantuan tunai. Strategi utama meliputi pengembangan *One Village One Product (OVOP)*, optimalisasi otonomi daerah, serta sinergi antara pemerintah desa, dunia usaha, dan kearifan lokal. Pemerintah desa di KBB menerapkan strategi berbasis potensi lokal melalui program OVOP. Ini bertujuan meningkatkan nilai ekonomi produk khas desa untuk mengurangi angka kemiskinan di tingkat tapak. Kemudian, program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) (KUBE) untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan keluarga miskin, serta pemberdayaan kewirausahaan sosial sebagai strategi di tingkat regional Jawa Barat yang diterapkan di KBB yang melibatkan pengembangan wirausaha sosial sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Strategi pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga berfokus pada pengembangan UMKM, optimalisasi sektor pertanian/pariwisata berbasis potensi lokal, serta sinergi *multi-stakeholders*. Pendekatan ini mencakup pelatihan manajemen, fasilitasi permodalan, dan penyediaan ruang usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Berikut adalah rincian strategi pemberdayaan ekonomi di KBB:

1) Pengembangan UMKM dan Kewirausahaan:

- a) Fasilitasi Ruang Usaha: Penyediaan tempat bagi pelaku UMKM di pusat perbelanjaan modern (contoh: IKEA Kota Baru Parahyangan) dan toko ritel modern (Alfa, Indomaret, Yomart).
- b) Pelatihan Manajemen dan Pemasaran: Mengundang perguruan tinggi untuk pendampingan teknis dan manajerial, serta integrasi dalam dokumen pembangunan desa (RPJMDes).
- c) Pemberdayaan Berbasis Produk Lokal: Contohnya, inisiatif "Kampung Sepatu" di Desa Tanimulya untuk mengembangkan potensi kerajinan lokal.

2) Penguatan Sektor Potensial (Pertanian dan Pariwisata):

- a) Kemitraan Plasma: Kemitraan antara petani lokal dengan perusahaan untuk meningkatkan produksi dan akses pasar.
- b) Pemberdayaan di Wilayah Lembang: Sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal untuk memaksimalkan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata.

3) Sinergi dan Pendanaan:

- a) Kolaborasi Lintas Lembaga: Sinergi antara Pemkab Bandung Barat, Pemprov Jabar, dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk penguatan koperasi dan perluasan akses Ultra Mikro (UMi).
- b) Zakat Produktif: Program BAZNAS KBB (seperti program Zmart) untuk mendukung kemandirian ekonomi mustahik agar tidak tergantung pada bantuan konsumtif.

4) Pemberdayaan Masyarakat Khusus:

- a) Pemberdayaan Perempuan: Melalui program ekonomi produktif tingkat desa dan penguatan kelompok rentan.
- b) Pemberdayaan Karang Taruna: Melibatkan karang taruna dalam inisiatif ekonomi masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi terbatasnya modal dan keterampilan manajemen, yang diatasi dengan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan profesional.

Strategi pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui pengembangan potensi lokal di KBB berfokus pada kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, swasta, akademisi, media, masyarakat) untuk mengembangkan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, khususnya di wilayah Lembang dan sekitarnya. Penguatan ini mencakup digitalisasi produk lokal melalui aplikasi "KBB Berkah" dan optimalisasi desa wisata berbasis kearifan lokal. Berikut adalah jabaran strategi berbasis potensi lokal di KBB:

1) Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal:

- a) Fokus pada pengembangan desa wisata (seperti di Cililin) yang menonjolkan keunggulan lokal, budaya, dan alam.
- b) Penguatan citra wisata yang unik dengan melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan.

2) Optimalisasi Ekonomi Kreatif dan UMKM:

- a) Pemanfaatan bahan baku lokal di Lembang dan sekitarnya untuk produk kreatif.
- b) Penerapan inovasi untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan melalui Inovasi Fekraf Bandung Barat.
- c) Digitalisasi UMKM melalui katalog produk di super apps "KBB Berkah" untuk mempermudah pemasaran.

3) Strategi Kolaborasi (Pentahelix):

- a) Melibatkan berbagai pihak secara konsisten — pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan swasta — untuk mendukung branding "*The Beauty of Priangan*".
- b) Peningkatan nilai jual produk melalui kreativitas dan keahlian lokal.

4) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Potensi Daerah:

- a) Mengoptimalkan otonomi daerah untuk menggerakkan ekonomi akar rumput.

Strategi ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat posisi KBB sebagai destinasi unggulan di Jawa Barat.

b. Strategi Perlindungan Sosial

Strategi perlindungan sosial di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berfokus pada penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tingkat desa untuk mendekatkan layanan, integrasi data terpadu ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) — sekarang berganti

menjadi DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) — serta pemberdayaan masyarakat inklusi, terutama penyandang disabilitas dan perempuan. Dinas Sosial KBB juga memperkuat rujukan pelayanan dan sinergi program untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara efisien. Berikut adalah poin-poin utama strategi perlindungan sosial KBB:

- 1) **Penguatan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial):** Dinsos KBB memaksimalkan peran Puskesmas di desa-desa untuk mempermudah akses warga miskin/rentan mendapatkan layanan sosial, seperti penyaluran bantuan dan rujukan.
- 2) **Optimalisasi Data Terpadu:** Memperbaiki dan memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bantuan lebih tepat sasaran, sejalan dengan implementasi SDGs (*No Poverty*).
- 3) **Pemberdayaan Masyarakat Inklusi:** Menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi daerah dan program inklusi, didukung oleh kebijakan pemberdayaan yang partisipatif.
- 4) **Sinergi Layanan Rujukan Terpadu:** Membangun sistem rujukan terpadu (SLRT) untuk penanganan cepat, termasuk perlindungan perempuan dan anak, serta koordinasi bantuan sosial (seperti PKH).
- 5) **Peningkatan Efektivitas Bantuan:** Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program perlindungan sosial agar benar-benar berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di KBB. Pelayanan perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial melalui Program Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk bantuan tunai dan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) untuk perbaikan tempat tinggal.

c. Strategi Optimalisasi Otonomi Daerah Melalui SDGs Desa

Pemerintah KBB memanfaatkan otonomi daerah untuk memetakan kemiskinan secara sistematis, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) nomor 1, yaitu *No Poverty*. Optimalisasi otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui SDGs Desa diwujudkan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan, mengintegrasikan data kemiskinan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Strategi ini fokus pada penanggulangan kemiskinan (*SDGs No Poverty*) melalui inovasi kebijakan lokal dan pemanfaatan potensi ekonomi. Strategi optimalisasi otonomi daerah melalui SDGs Desa di KBB adalah sebagai berikut:

- 1) **Penguatan Tata Kelola dan Data:** Pemerintah KBB memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan integrasi data lintas sektor agar program lebih tepat sasaran.
- 2) **Optimalisasi Potensi Lokal:** Mendorong pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan ekonomi kreatif/hijau sebagai bentuk inovasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.
- 3) **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam menangani kemiskinan.
- 4) **Pemanfaatan Sektor Unggulan:** Di wilayah seperti Kecamatan Lembang, optimalisasi dilakukan melalui sektor pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan.

Strategi ini krusial untuk mempercepat pencapaian target SDGs di tingkat lokal serta meningkatkan kemandirian desa dalam kerangka otonomi daerah.

d. Strategi Analisis Data Berbasis Wilayah

Penggunaan analisis data (seperti Indeks Moran) untuk memetakan sebaran kemiskinan di 165 desa di KBB agar intervensi lebih tepat sasaran. Pemerintah KBB terus berupaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan agar program yang dijalankan lebih efisien dan berkelanjutan.

Strategi analisis data berbasis wilayah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengintegrasikan pendekatan kualitatif-empirik (SWOT, studi kasus), pemanfaatan data sektoral (pariwisata, lingkungan hidup), BPS, serta perencanaan berbasis data untuk UMKM dan pemilu. Analisis ini menekankan transformasi digital untuk tata kelola pemerintahan yang terstruktur.

Berikut adalah poin-poin penting dalam strategi tersebut:

- 1) **Pendekatan Analisis Data:** Menggunakan analisis empirik, studi lapangan, dan in-depth interview dengan pendekatan SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di setiap sektor wilayah.
- 2) **Optimalisasi Data Sektoral:** Menggunakan data dari Disparbud KBB, BPS (KBB dalam Angka), dan Dinas Lingkungan Hidup untuk perencanaan kebijakan, termasuk tata kelola ruang terbuka hijau.
- 3) **Transformasi Digital Desa:** Pengembangan perencanaan strategis sistem informasi di tingkat desa untuk mempermudah pengambilan keputusan.
- 4) **Strategi Pemasaran dan Branding:** Analisis pasar dan destinasi branding pariwisata yang didukung data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- 5) **Pendampingan Berbasis Data:** Penggunaan data untuk meningkatkan pemasaran UMKM di wilayah spesifik.

Mencermati penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa strategi pemerintah KBB dalam penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada ekonomi dan tidak menyentuh aspek sosial-budaya dan sedikit sekali berkaitan dengan aspek struktural atau politik. Kebudayaan kemiskinan menurut Oscar Lewis (Suparlan, 1984), antara lain telah mendorong terwujudnya sikap-sikap menerima nasib, meminta-minta, atau mengharapkan bantuan dan sedekah, sebenarnya merupakan suatu adaptasi yang rasional dan cukup pandai dalam usaha mengatasi kemiskinan yang mereka hadapi. Kebudayaan kemiskinan itu lestari melalui sosialisasi, maka usaha-usaha untuk memerangi kemiskinan yang dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dalam pola sosialisasi anak-anak miskin.

Sementara, kemiskinan struktural bukanlah kemiskinan yang dialami oleh seorang individu oleh karena dia malas bekerja atau karena dia sakit terus-menerus. Kemiskinan yang demikian ini adalah bersifat individual, bukan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Soemardjan, 1980). Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin yang dialami sekelompok masyarakat karena ketidakadilan sistem sosial, politik, atau ekonomi yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya, pendidikan, dan lapangan kerja. Kelompok ini tidak berdaya memperbaiki nasib karena struktur yang ada memonopoli kekayaan, menciptakan ketergantungan dan kemiskinan yang berlangsung lama.

Dalam hal ini, menurut Rajab (2006) pendekatan struktural melihat sebab kemiskinan sebagai akibat ketimpangan dalam penguasaan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi, atau sumber-sumber daya ekonomi (Rajab, 2006). Kemiskinan adalah cermin dari

ketidakseimbangan dalam akses dan kontrol atas sarana ekonomi serta berlangsungnya eksploitasi dari kekuatan ekonomi dan politik dominan, sehingga mempersempit ruang gerak ekonomi sebagian warga masyarakat untuk berkembang. Saran pendekatan struktural dalam mengeliminasi kemiskinan yang utamanya adalah melalui kebijakan politik ekonomi yang langsung menghapus sumber-sumber ketimpangan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan kemiskinan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Penyusunan RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Tahun 2025-2030, dan kebijakan spesifik dalam program "*Bandung Barat Ca'ang*". Sementara, strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, optimalisasi otonomi daerah melalui SDGs Desa, dan analisis data berbasis wilayah. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan multi dimensi (ekonomi, budaya, dan struktural) dan multisektor. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan dituntut memiliki komitmen yang kuat dalam merumuskan serta mengaplikasikan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Paradigma penanggulangan kemiskinan yang hanya memandang kemiskinan sebagai persoalan ekonomi semata adalah menjadi salah satu penyebab kegagalan penanganan masalah kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan bukan sekadar pemberian bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh data yang akurat, arah kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Selain itu, perlunya Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Bandung Barat, yang menjadi dasar hukum yang mengatur pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selanjutnya, agar dilakukan penelitian yang spesifik tentang kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis budaya lokal di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliansyah, Fuadi, W., H., P., & Juanda, R. (2024). Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia: Sebuah fakta di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 73–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13314063>
- Aulia, H., H., & Saputra, R. (2021). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 2(2), 26–40.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Bandung Barat dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. <https://bandungkab.bps.go.id/id>
- Berg, B. L. (n.d.). *Qualitative research methods for the social sciences 4th Edition* (4th Editio). Allyn and Bacon.
- Bryman, A. (2008). *Social research methods* (Third Edit). Oxford University Press Inc.
- Corbetta, P. (2003). *Social research theory, methods and techniques*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Third Edit). SAGE Publications.
- Hardiyansyah, R., & Amin, M. (2025). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di

- Kabupaten Cirebon. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 146–161.
- Johann Mouton, H. C. M. (1988). *Basic Concepts in the Methodology of the Social Sciences. HSRC Studies in Research Methodology*. Human Sciences Research Council.
- Martono, N. (2016). *Metode penelitian sosial: Konsep-konsep kunci* (Jakarta (ed.); Cetakan Ke). PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M.B. & Huberman, A. . (1994). *Qualitative data analysis* (Second Edi). Sage Publications, International Education and Professional Publisher.
- Moeljarto, V. (1994). *Kemiskinan: Hakikat, ciri, dimensi, dan kebijakan. Dalam Kemiskinan Mengais Sumber Daya* (3). Majalah Analisis.
- Patton, M. Q. (2002). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (Third Edit). SAGE Publications.
- Payne, G. and Payne, J. (2011). *Key concepts in social research*. SAGE Publications.
- Pemda KBB. (2024). *Laporan penanggulangan kemiskinan daerah (TPKD)*. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Rajab, B. (2006). *Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan struktural. Dalam Koreksi Terhadap Strategi Pembangunan di Papua*. Analisis CSIS.
- Saldana, J. (2009). *The Coding manual for qualitative researchers*. SAGE Publication Ltd.
- Santoso, E., B., Sutikno, Siswanto, V., K., dan Setyaningsih, Y. (2023). Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui integrasi program antar OPD. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.447>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT. Kanisius.
- Snape, D., & Spencer, L. (2003). *The Foundations of qualitative research*”, in J. Ritchie & J. Lewis (eds.). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. SAGE Publications.
- Soemardjan, S. (1980). *Kemiskinan struktural dan pembangunan: Kata pengantar. Dalam Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Strauss, A. L. and Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. SAGE Publications.
- Suparlan, P. (1984). *Pendahuluan. Dalam Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun. (2023). *Modul Konsumsi dan Pengeluaran*. Badan Pusat Statistik.